DAFTAR ISI

Kata Pengantar ~ vii

Bab I. Permasalahan dan Prospek Legislasi di Daerah ~ 1

1.1 Pendahuluan ~ 1

1.2 Kerangka Pemikiran Pembentukan Peraturan Daerah ~ 10

1.2.1 Hubungan Pusat dan Daerah ~ 10

1.2.2 Kewenangan Pembentukan Perda ~ 12

1.2.3 Proses Pembentukan Peraturan di Daerah ~ 14

1.2.4 Pergeseran Sistem Pengawasan Pusat terhadap Daerah ~ 16

1.2.5 Partisipasi/Aksesibilitas Publik ~ 18

1.3 Pelaksanaan Penelitian ~ 19

1.4 Lokasi Penelitian ~ 22

1.5 Sistematika Penulisan ~ 22

Bab II. Proses Legislasi di Daerah: Sebuah Tinjauan Konseptual dan Dinamika Kebijakan di Indonesia ~ 26

2.1. Pendahuluan ~ 26

2.2 Proses Pembentukan Perda di Lingkungan Pemda dan DPRD ~ 27

2.2.1 Perencanaan ~ 27

2.2.2 Penyusunan ~ 31

2.2.3 Pembahasan ~ 34

2.2.4 Penetapan Perda ~ 36

2.2.5 Pengawasan ~ 37

2.3 Partisipasi/Aksesibilitas Publik dalam Pembentukan Perda ~ 49

Bab III. Praktek Legislasi di DKI Jakarta dan Kota Tangerang ~ 53
3.1 Pendahuluan ~ 53
3.2 Proses Pembentukan Perda di Pemda: Perencanaan dan Penyusunan Raperda ~ 54
3.3 Pembentukan di DPRD: Perancangan Hingga Pembahasan ~ 61

Bab IV. Pembatalan Perda Bermasalah ~ 82
4.1 Pembatalan Perda Secara Umum ~ 82
4.2 Pembatalan Perda di DKI Jakarta dan Kota Tangerang ~ 85
4.2.1 Pembatalan oleh Mahkamah Agung ~ 85
4.2.2 Pembatalan oleh Depdagri ~ 90

Bab V. Analisis Hubungan Antar Lembaga Dalam Proses Pembentukan Perda ~ 92
5.1 Pembentukan Perda: Isu Nasional atau Daerah? ~ 92
5.2 Peran Lembaga-lembaga Lain dalam Pembentukan Perda ~ 93
5.2.1 Departemen Dalam Negeri ~ 93
5.2.2 Kanwil Departemen Hukum dan HAM ~ 97
5.2.3 Peran Departemen Teknis Terkait Substansi ~ 103

Bab VI. Kesimpulan dan Rekomendasi ~ 105
6.1 Kesimpulan ~ 105
6.1.1 Mengapa Ada Perda Bermasalah? ~ 106
6.1.2 Mengapa Banyak Perda Dibatalkan? ~ 107
6.1.3 Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Proses Legislasi di Daerah ~ 108
6.2 Rekomendasi ~ 110

Daftar Pustaka ~ 115
Indeks ~ 119
Tentang Penulis ~ 121